

## **PENGUATAN DAYA SAING UMKM DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN: PENGARUH PEMBERDAYAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, INOVASI BISNIS, DAN DUKUNGAN PEMERINTAH**

**Citra Amaliah Ali<sup>1</sup>, Yakup<sup>2</sup>, Deby R. Karundeng<sup>3\*</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Magister Manajemen, Universitas Gorontalo, Jln A.A Wahab 247,  
Kabupaten Gorontalo, Indonesia

\*Email: [deby.rk21@gmail.com](mailto:deby.rk21@gmail.com)

**ABSTRAK.** Penelitian ini menganalisis pengaruh pemberdayaan, kemudahan perizinan, inovasi bisnis, dan dukungan pemerintah terhadap daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Desain penelitian menggunakan pendekatan *explanatory* kuantitatif yang didukung data kualitatif melalui wawancara dan observasi. Data primer dikumpulkan menggunakan kuesioner skala Likert 1–5 terhadap 100 pelaku UMKM pada sektor perdagangan, jasa, kuliner, dan industri rumah tangga, yang ditentukan dengan teknik *non-probability sampling*. Analisis data dilakukan dengan regresi linier berganda setelah memenuhi uji validitas, reliabilitas, dan asumsi klasik. Hasil pengujian simultan menunjukkan bahwa keempat variabel berpengaruh signifikan terhadap daya saing UMKM ( $F=13,559$ ;  $p<0,001$ ), dengan koefisien determinasi *Adjusted R*<sup>2</sup>=0,337. Secara parsial, pemberdayaan, kemudahan perizinan, inovasi bisnis, dan dukungan pemerintah masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya saing UMKM ( $p<0,05$ ), dengan pemberdayaan sebagai variabel dengan kontribusi terbesar. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa penguatan daya saing UMKM tidak dapat ditopang oleh intervensi tunggal, melainkan memerlukan orkestrasi kebijakan yang memadukan pengembangan kapasitas pelaku usaha, layanan perizinan yang inklusif, pembinaan inovasi berkelanjutan, serta dukungan pemerintah berbasis ekosistem pasar yang terukur. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis berupa integrasi faktor internal dan eksternal dalam satu kerangka empiris daya saing UMKM, sekaligus memberikan masukan kebijakan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat keberlanjutan UMKM lokal.

**Kata Kunci:** Daya Saing UMKM, Dukungan Pemerintah, Inovasi Bisnis, Kemudahan Perizinan, Pemberdayaan.

**ABSTRACT:** *This study analyzes the influence of empowerment, ease of licensing, business innovation, and government support on the competitiveness of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in South Bolaang Mongondow Regency. The research employs a quantitative explanatory design supported by qualitative data obtained through interviews and observations. Primary data were collected using a Likert 1–5 scale questionnaire from 100 MSME actors in the trade, services, culinary, and household industry sectors, selected through non-probability sampling. Multiple linear regression analysis was conducted after fulfilling validity, reliability, and classical assumption tests. The simultaneous test indicates that the four variables significantly affect MSME competitiveness ( $F=13.559$ ;  $p<0.001$ ), with an Adjusted  $R^2=0.337$ . Partially, empowerment, ease of licensing, business innovation, and government support each have a positive and significant effect on MSME competitiveness ( $p<0.05$ ), with empowerment showing the largest contribution. The findings suggest that strengthening MSME competitiveness cannot rely on a single intervention but requires an orchestrated policy approach that integrates capacity*

*building of business actors, inclusive licensing services, sustainable innovation development, and government support grounded in a measurable market ecosystem. This study contributes theoretically by integrating internal and external factors within a single empirical framework of MSME competitiveness, while providing policy input for local governments to strengthen the sustainability of local MSMEs.*

**Keywords:** *Business Innovation, Ease of Licensing, Empowerment, Government Support, MSME Competitiveness.*

## **1. PENDAHULUAN**

Penguatan daya saing UMKM menjadi agenda strategis bagi pembangunan ekonomi daerah karena UMKM berperan sebagai penggerak aktivitas produksi, penciptaan nilai tambah, dan perluasan kesempatan kerja pada tingkat lokal. Daya saing UMKM dipahami sebagai kemampuan usaha kecil untuk menciptakan nilai tambah, menjaga keberlanjutan, dan memenangkan persaingan pasar, yang dibentuk oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Perspektif ini selaras dengan kerangka daya saing berbasis struktur industri dan sumber daya, yakni Porter's Diamond Model serta *Resource-Based View* yang menekankan keunggulan berbasis sumber daya unik. Dalam konteks UMKM, keunggulan tersebut dapat berupa diferensiasi produk lokal, jaringan sosial, dan kemampuan inovasi yang sulit ditiru pesaing. Teori kapabilitas dinamis juga menegaskan bahwa adaptasi dan rekonfigurasi sumber daya diperlukan agar usaha tetap kompetitif di tengah perubahan lingkungan. Oleh karena itu, daya saing UMKM tidak dapat dilepaskan dari praktik pemberdayaan, inovasi, serta dukungan kebijakan yang membentuk ekosistem usaha. Kerangka konseptual tersebut menjadi relevan ketika penelitian memfokuskan perhatian pada daerah dengan karakter semi-rural seperti Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Barney, 2021; Teece, 2020; Tambunan, 2020).

Fenomena di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menunjukkan bahwa pemerintah daerah mulai mendorong penguatan UMKM melalui program pemberdayaan yang lebih terarah dan berbasis kebutuhan pelaku usaha. Program tersebut mencakup bimbingan teknis manajemen usaha, pelatihan digitalisasi bisnis, serta fasilitasi keikutsertaan UMKM dalam pameran produk unggulan daerah. Upaya ini menandai pergeseran pendekatan pemerintah dari sekadar administrasi program menjadi penguatan kapasitas pelaku usaha untuk memperluas akses pasar. Praktik tersebut konsisten dengan gagasan *Governance and Public Sector Support* yang menempatkan pemerintah sebagai pencipta struktur kebijakan yang efisien dan ramah inovasi. Dalam perspektif pilihan publik,

dukungan pada UMKM juga dapat dipahami sebagai langkah rasional untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat fondasi ekonomi domestik. Dengan demikian, fenomena kebijakan pro-UMKM di daerah ini dapat dibaca sebagai upaya membangun pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan melalui penguatan sektor riil. Namun, capaian kebijakan tersebut tetap memerlukan evaluasi empiris terhadap faktor-faktor yang benar-benar mendorong daya saing UMKM di tingkat daerah (Storey, 2020; North, 2022).

Permasalahan pertama yang masih menonjol terletak pada aspek kemudahan perizinan dan efektivitas implementasi reformasi layanan publik bagi pelaku UMKM. Secara teoretis, penyederhanaan perizinan melalui OSS dan layanan DPMPSTP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dapat memangkas hambatan birokrasi yang selama ini menghambat pertumbuhan UMKM. Pandangan ini sejalan dengan argumen bahwa prosedur birokrasi yang rumit menjadi salah satu penghambat utama perkembangan UMKM di Indonesia. Kerangka *Business Environment Model* juga menekankan bahwa regulasi yang efisien merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas dan formalisasi usaha. Pada tingkat praktik, pengalaman pelaku UMKM menunjukkan bahwa pengurusan NIB dapat diselesaikan relatif singkat, bahkan kurang dari satu hari kerja, yang menandai kemajuan dibanding kondisi sebelumnya yang dapat memakan waktu berminggu-minggu. Meskipun demikian, tantangan tetap dapat muncul dalam bentuk literasi penggunaan sistem digital, kesenjangan akses layanan, dan kualitas pendampingan perizinan pada tingkat kecamatan dan desa. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kemudahan perizinan bukan hanya isu prosedural, tetapi juga isu kapasitas implementasi layanan publik yang berpengaruh pada daya saing usaha (Tambunan, 2019; World Bank, 2019).

Permasalahan kedua berkaitan dengan inovasi bisnis dan keterbatasan kemampuan UMKM dalam melakukan pembaruan produk, proses, pemasaran, dan organisasi secara berkelanjutan. Inovasi dipahami sebagai kemampuan menciptakan kebaruan, memperbaiki proses produksi, mengadopsi teknologi, serta mengembangkan strategi pemasaran adaptif agar mampu bersaing. Kerangka inovasi yang komprehensif menempatkan inovasi produk, proses, pemasaran, dan organisasi sebagai dimensi yang saling melengkapi. Namun, tantangan di Bolssel tercermin pada keterbatasan literasi teknologi dan modal untuk inovasi, sehingga sebagian UMKM masih mengandalkan metode tradisional dan sulit menembus pasar

lebih luas. Dari sudut pandang RBV, inovasi merupakan sumber daya strategis yang sulit ditiru, sehingga keterbatasan inovasi akan langsung melemahkan posisi bersaing. Dari sudut pandang kapabilitas dinamis, keterbatasan inovasi juga menghambat kemampuan adaptasi terhadap perubahan pasar. Dengan demikian, problem inovasi bisnis tidak sekadar isu teknis produksi, tetapi juga isu strategis yang memengaruhi keberlanjutan dan ekspansi UMKM (OECD, 2018; Rahman, 2022; Nugroho, 2023; Barney, 2021; Teece, 2020).

Dampak dari lemahnya daya saing UMKM berpotensi meluas pada menurunnya kemampuan daerah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Ketika UMKM sulit meningkatkan produktivitas dan akses pasar, peluang penciptaan kerja juga menjadi terbatas dan kerentanan ekonomi rumah tangga meningkat. Sebaliknya, dukungan pemerintah yang efektif dapat memperkuat legitimasi sosial pelaku UMKM melalui peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap produk lokal. Kepercayaan tersebut dapat mendorong loyalitas konsumen dan memperkuat daya saing produk daerah, sehingga tercipta efek pengganda bagi perekonomian lokal. Penguatan kelembagaan seperti koperasi dan asosiasi usaha lokal juga dapat menurunkan biaya distribusi, memperkuat posisi tawar dalam rantai pasok, dan meningkatkan daya saing kolektif. Dalam perspektif developmental state, arah pembangunan sektor riil memerlukan peran pemerintah yang aktif sebagai pengarah, bukan pengendali, agar ekosistem usaha tumbuh tanpa kehilangan otonomi bisnis. Oleh karena itu, isu daya saing UMKM di Bolsel memiliki konsekuensi kebijakan yang nyata karena terkait langsung dengan produktivitas, kemandirian usaha, dan kesejahteraan masyarakat (Johnson, 1982; Lestari, 2023).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dukungan eksternal seperti kebijakan pemerintah, infrastruktur digital, dan integrasi pasar regional sering menjadi penentu penting daya saing UMKM di negara berkembang. Temuan tersebut menggarisbawahi bahwa daya saing UMKM tidak cukup dijelaskan oleh faktor internal semata, tetapi juga dipengaruhi kondisi kelembagaan dan dukungan kebijakan. Sejumlah kajian juga menegaskan bahwa dukungan pemerintah melalui pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi pemasaran berasosiasi dengan peningkatan kinerja serta daya saing UMKM. Selain itu, literatur mengenai inovasi menekankan bahwa UMKM inovatif cenderung memiliki pertumbuhan yang lebih baik dibanding UMKM yang bertahan pada pola tradisional. Transformasi digital pada aspek

pemasaran juga sering diposisikan sebagai jalur percepatan daya saing, terutama untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan efisiensi operasional. Namun, sebagian praktik dukungan pemerintah di banyak daerah masih dinilai bersifat seremonial, misalnya pelatihan tanpa tindak lanjut, bantuan modal tanpa monitoring, serta distribusi program yang belum merata. Konsekuensinya, temuan-temuan terdahulu membutuhkan pengujian lebih kontekstual pada daerah semi-rural seperti Bolsel, terutama untuk menilai efektivitas intervensi pemerintah pada kondisi keterbatasan kapasitas lokal (Rahman, 2022; Nugroho, 2023; Fitriani, 2023; Storey, 2020).

Pada sisi lain, penelitian terdahulu juga menempatkan kemudahan perizinan sebagai faktor eksternal yang mempercepat formalisasi usaha dan meningkatkan produktivitas melalui lingkungan regulasi yang lebih efisien. Reformasi layanan publik melalui sistem digital dinilai dapat meningkatkan kepuasan masyarakat serta memperkuat kepercayaan terhadap pemerintah sebagai regulator. Penguatan aspek regulasi kemudian diperkirakan memberi ruang bagi pelaku UMKM untuk berfokus pada aktivitas produktif, bukan tersandera prosedur administratif yang panjang. Di level psikologis, kemudahan perizinan dapat meningkatkan rasa diakui secara resmi dan mendorong semangat kewirausahaan baru, terutama di kalangan generasi muda. Pada saat yang sama, pemberdayaan melalui pelatihan manajemen, digitalisasi, dan fasilitasi pameran diposisikan sebagai mekanisme peningkatan kapasitas pelaku usaha untuk memperluas pasar dan memperkuat kualitas produk. Kombinasi regulasi yang ramah UMKM dan pemberdayaan yang tepat sasaran dengan demikian dipahami sebagai dua sisi yang saling melengkapi dalam membangun daya saing. Akan tetapi, literatur dan praktik sering belum secara konsisten menilai bagaimana faktor-faktor tersebut bekerja secara terintegrasi dalam satu model empiris pada konteks daerah tertentu (World Bank, 2019; Tambunan, 2019).

Riset gap penelitian ini terletak pada keterbatasan bukti empiris yang menguji pengaruh pemberdayaan, kemudahan perizinan, inovasi bisnis, dan dukungan pemerintah secara simultan dalam menjelaskan daya saing UMKM pada konteks daerah semi-rural. Banyak kajian menyoroti inovasi atau dukungan pemerintah secara terpisah, sementara interaksi antar faktor internal-eksternal dalam satu kerangka analitis masih relatif jarang diuji, khususnya pada wilayah yang menghadapi keterbatasan literasi teknologi dan kapasitas implementasi layanan

publik. Padahal, definisi daya saing UMKM menekankan interaksi multi-faktor, sehingga pengujian parsial berisiko menyederhanakan mekanisme yang sebenarnya terjadi. Selain itu, konteks Bolsel memperlihatkan adanya program pemberdayaan, reformasi perizinan, serta agenda promosi produk daerah, tetapi belum jelas faktor mana yang paling menentukan daya saing dan bagaimana kekuatan pengaruhnya ketika diuji bersama. Karena itu, penelitian ini menutup celah pengetahuan dengan menyatukan variabel-variabel kunci tersebut sebagai determinan daya saing UMKM dalam satu desain empiris yang terfokus pada Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Kerangka ini juga memperkaya diskusi teoretis mengenai sinergi faktor internal dan eksternal dalam membentuk keunggulan bersaing UMKM. Dengan demikian, novelty penelitian terletak pada integrasi determinan daya saing yang diuji secara komprehensif dan kontekstual pada daerah tertentu, bukan sekadar generalisasi lintas wilayah (Tambunan, 2020; Rahman, 2022; Nugroho, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, pertanyaan penelitian diformulasikan untuk menilai pengaruh pemberdayaan, kemudahan perizinan, inovasi bisnis, dan dukungan pemerintah terhadap daya saing UMKM di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, baik secara parsial maupun simultan. Tujuan penelitian adalah menganalisis pengaruh masing-masing variabel terhadap daya saing UMKM serta menguji kekuatan pengaruh gabungan keempat variabel dalam satu model. Implikasi teoretis penelitian ini berupa pengayaan literatur daya saing UMKM melalui integrasi faktor internal-eksternal dalam satu kerangka empiris yang relevan untuk konteks daerah semi-rural. Implikasi praktis diarahkan pada penyusunan kebijakan daerah yang lebih tepat sasaran, misalnya penguatan program pemberdayaan berbasis kapasitas, peningkatan kualitas pendampingan perizinan OSS/DPMPSTP, percepatan literasi teknologi untuk inovasi, serta konsistensi dukungan pemerintah melalui pembinaan, promosi, dan penguatan kelembagaan. Temuan juga dapat menjadi pedoman bagi pelaku UMKM untuk memprioritaskan strategi inovasi produk, proses, pemasaran, dan organisasi agar lebih adaptif terhadap dinamika pasar. Bagi akademisi, hasil penelitian dapat menjadi rujukan studi lanjutan terkait keterkaitan regulasi, pemberdayaan, inovasi, dukungan pemerintah, dan daya saing pada setting daerah. Dengan struktur pertanyaan, tujuan, dan implikasi tersebut, penelitian ini menempatkan daya saing UMKM sebagai keluaran strategis dari sinergi kebijakan publik dan kapabilitas bisnis pada level lokal (Fitriani, 2023; Storey, 2020).

## **2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

**Daya saing UMKM** dipahami sebagai kemampuan pelaku usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan posisi usaha melalui efisiensi, kualitas, inovasi, dan perluasan akses pasar sehingga mampu bertahan dalam tekanan kompetisi. Dalam kerangka ini, daya saing tidak hanya ditentukan oleh faktor internal (kapabilitas dan sumber daya), tetapi juga oleh lingkungan kelembagaan yang membentuk biaya transaksi, legalitas, dan akses dukungan kebijakan. Perspektif ini selaras dengan pandangan bahwa keunggulan kompetitif dibangun melalui strategi, produktivitas, dan penguatan kapabilitas yang berkelanjutan (Teece, 2020; Tambunan, 2019). Dengan demikian, daya saing UMKM di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan perlu diposisikan sebagai keluaran (*outcome*) dari sinergi penguatan kapasitas usaha, kemudahan formalitas, inovasi, serta dukungan ekosistem pemerintah yang konsisten.

**Pemberdayaan UMKM (X1)** dalam penelitian menekankan proses *capacity building* yang mencakup akses permodalan, pelatihan manajerial, fasilitasi pemasaran, digitalisasi usaha, dan pendampingan berkelanjutan, sehingga pemberdayaan dipahami sebagai intervensi jangka panjang, bukan program sesaat. Pemberdayaan yang kuat mendorong peningkatan kompetensi pengelola, penguatan jejaring, serta kemampuan mengambil keputusan usaha yang lebih adaptif terhadap perubahan pasar. Di tingkat kebijakan, pemberdayaan juga dikaitkan dengan mandat regulatif nasional (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja), tetapi praktik pemberdayaan yang parsial, misalnya bantuan modal tanpa pendampingan, masih membatasi dampak peningkatan kinerja—misalnya bantuan modal tanpa pendampingan—membatasi dampak peningkatan kinerja. Karena itu, pemberdayaan menjadi prasyarat penting bagi UMKM agar mampu meningkatkan produktivitas, kualitas layanan/produk, dan penetrasi pasar. Dimensi pemberdayaan yang digunakan dalam penelitian meliputi akses pembiayaan, pelatihan teknis/manajerial, pendampingan usaha, dan penguatan jejaring, yang secara teoritis memperkuat daya saing melalui akumulasi kemampuan operasional dan pemasaran (Zimmerman, 2020; Kurniawati et al., 2022).

**Kemudahan perizinan (X2)** diposisikan sebagai faktor kelembagaan yang menurunkan hambatan masuk ke sektor formal dan memperluas akses sumber

daya. Penelitian menegaskan bahwa legalitas usaha memungkinkan UMKM mengakses pembiayaan formal, mengikuti pengadaan/tender, serta memperoleh perlindungan hukum, sehingga perizinan bukan sekadar administrasi, melainkan instrumen peningkatan peluang ekonomi. Dalam konteks reformasi regulasi, kemudahan perizinan menurunkan *transaction cost* melalui penyederhanaan prosedur, biaya, dan waktu, serta memperkuat transparansi layanan. Indikatornya mencakup prosedur dan waktu, biaya perizinan, transparansi proses, serta akses OSS (Online Single Submission) yang merefleksikan transformasi digital layanan publik. Secara konseptual, perbaikan kualitas perizinan berdampak pada perluasan akses kredit dan pasar karena UMKM yang formal lebih mudah dinilai bankable dan kredibel dalam rantai pasok (World Bank, 2019, 2020; Wahyudi, 2021).

**Inovasi bisnis (X3)** dijelaskan sebagai kemampuan UMKM menciptakan atau memodifikasi produk, memperbaiki proses produksi, mengadopsi teknologi, dan mengembangkan strategi pemasaran yang adaptif agar mampu bersaing secara berkelanjutan. Inovasi dalam kerangka ini bersifat luas: bukan hanya inovasi produk, tetapi juga inovasi proses, pemasaran, dan organisasi/manajerial. Penelitian mengadopsi indikator inovasi berupa inovasi produk, inovasi proses, inovasi pemasaran (misalnya digital marketing/branding/distribusi), dan inovasi organisasi (profesionalisasi pengelolaan dan penggunaan teknologi sederhana). Secara teoritis, inovasi memperkuat diferensiasi dan efisiensi sekaligus, sehingga UMKM dapat meningkatkan nilai tambah, memperluas pasar, dan meningkatkan daya tahan terhadap imitasi. Kerangka inovasi ini sejalan dengan pendekatan pengukuran inovasi yang menekankan perubahan pada produk, proses, pemasaran, dan organisasi sebagai determinan kinerja (OECD/Eurostat, 2018; Rahman, 2022).

**Dukungan pemerintah (X4)** dalam penelitian dipahami sebagai intervensi kebijakan, program, dan fasilitasi untuk menciptakan ekosistem usaha yang kondusif bagi UMKM, mencakup regulasi, pembiayaan, infrastruktur, serta akses pasar. Dukungan pemerintah penting karena banyak UMKM menghadapi kendala struktural: keterbatasan modal, minimnya literasi digital, keterbatasan jaringan pasar, dan lemahnya posisi tawar dalam rantai pasok. Penelitian menempatkan dukungan pemerintah sebagai “penguat ekosistem” yang membuat pemberdayaan, perizinan, dan inovasi dapat bekerja secara efektif, bukan berdiri sendiri. Indikator dukungan pemerintah merujuk pada fasilitasi program dan kebijakan yang membantu UMKM mengakses pembiayaan, peningkatan kapasitas, promosi/pasar,

---

dan kepastian regulasi, sehingga mempercepat proses upgrading usaha (Storey, 2020; Fitriani, 2023). Dengan demikian, dukungan pemerintah berfungsi sebagai *enabling environment* yang mengurangi risiko usaha dan memperbesar peluang tumbuh.

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka konseptual yang telah diuraikan, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Pemberdayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya saing UMKM.

H<sub>2</sub>: Kemudahan perizinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya saing UMKM.

H<sub>3</sub>: Inovasi bisnis berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya saing UMKM.

H<sub>4</sub>: Dukungan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya saing UMKM.

H<sub>5</sub>: Pemberdayaan, kemudahan perizinan, inovasi bisnis, dan dukungan pemerintah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya saing UMKM.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan desain explanatory kuantitatif dengan dukungan data kualitatif (wawancara dan observasi) untuk memperkuat pemaknaan temuan survei. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, karena UMKM di wilayah ini menghadapi tantangan pemberdayaan, perizinan, inovasi, serta dukungan pemerintah daerah yang relevan dengan fokus penelitian. Waktu pelaksanaan direncanakan selama 3 bulan (Juli–September 2025). Populasi penelitian adalah seluruh pelaku UMKM di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang bergerak pada sektor perdagangan, jasa, kuliner, dan kerajinan. Penentuan ukuran sampel mengacu pada rumus Ferdinand dengan ketentuan jumlah indikator dikalikan kebutuhan responden per indikator (5–10), sehingga pada 20 indikator diperoleh kebutuhan minimum 100 responden, dan jumlah tersebut digunakan untuk meningkatkan validitas analisis (Ferdinand, 2022).

Teknik pengambilan sampel menerapkan non-probability sampling (accidental/purposive) dengan kriteria responden: pelaku UMKM berusia minimal 18 tahun, bersedia mengisi kuesioner secara sukarela, dan memenuhi kriteria kelayakan sebagai responden UMKM di wilayah studi (misalnya telah menjalankan usaha serta memiliki legalitas/izin usaha atau NIB sesuai konteks perizinan daerah). Instrumen utama berupa kuesioner skala Likert 1–5 yang mengukur: pemberdayaan (mis. akses pembiayaan, pelatihan, pendampingan, jejaring) (Zimmerman, 2020);

---

Widyastuti et al., 2022), kemudahan perizinan (prosedur/waktu, biaya, transparansi, akses OSS) (World Bank, 2020; Wahyudi, 2021; Lestari, 2023), inovasi bisnis (produk, proses, pemasaran, organisasi) (OECD, 2018; Rahman, 2022; Nugroho, 2023), dukungan pemerintah (regulasi, finansial, pembinaan, infrastruktur) (Storey, 2020; Fitriani, 2023), serta daya saing UMKM (kualitas produk, efisiensi, akses pasar, keberlanjutan) (Porter, 1990; Tambunan, 2020). Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara pada informan kunci untuk triangulasi. Analisis data dilakukan dengan SPSS 26 melalui statistik deskriptif dan regresi linier berganda dengan model :

$$Y=a+b_1X_1+b_2X_2+b_3X_3+b_4X_4+e$$

Dimana:

Y = Daya Saing UMKM

a = konstanta

b<sub>1</sub>- b<sub>4</sub> = koefisien regresi masing-masing variabel bebas

X<sub>1</sub>-X<sub>4</sub>= variabel bebas penelitian

e = error term

Uji validitas menggunakan Pearson Product Moment, sedangkan reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha dengan batas kelayakan umumnya  $\geq 0,70$  (Nunnally, 2020). Sebelum uji hipotesis, dilakukan pengujian asumsi (normalitas, multikolinearitas melalui tolerance dan VIF, heteroskedastisitas, serta autokorelasi Durbin-Watson) agar hasil estimasi tidak bias dan dapat diinterpretasikan secara kuat.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Hasil**

##### **Karakteristik responden**

Komposisi responden menunjukkan gambaran pelaku UMKM yang cukup beragam dari sisi demografi dan karakter usaha. Responden didominasi oleh perempuan (54%) dibanding laki-laki (46%). Dari sisi usia, kelompok 31-40 tahun merupakan kategori terbanyak (33%), diikuti 41-50 tahun (29%), kemudian >50 tahun (20%) dan 20-30 tahun (18%). Tingkat pendidikan terakhir responden didominasi SMA/SMK (55%), disusul Sarjana/S1 (21%), SMP (14%), dan Diploma (10%). Dari jenis usaha, responden paling banyak bergerak pada perdagangan (42%), kemudian kuliner (25%), jasa (18%), serta industri rumah tangga (15%). Lama usaha

mayoritas berada pada rentang 4–6 tahun (42%), lalu 1–3 tahun (33%), >6 tahun (20%), dan <1 tahun (5%). Dari sisi skala omset, kelompok terbesar berada pada Rp2.000.000–Rp5.000.000 per bulan (40%), disusul Rp5.000.001–Rp10.000.000 (27%), <Rp2.000.000 (22%), dan >Rp10.000.000 (11%).

**Tabel 1.** Ringkasan karakteristik responden (n = 100)

Aspek	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
Jenis kelamin	Laki-laki	46	46.0
	Perempuan	54	54.0
Usia	20–30 tahun	18	18.0
	31–40 tahun	33	33.0
	41–50 tahun	29	29.0
	>50 tahun	20	20.0
Pendidikan	SMP	14	14.0
	SMA/SMK	55	55.0
	Diploma	10	10.0
	Sarjana (S1)	21	21.0
Jenis usaha	Perdagangan	42	42.0
	Kuliner	25	25.0
	Jasa	18	18.0
	Industri rumah tangga	15	15.0
Lama usaha	< 1 tahun	5	5.0
	1–3 tahun	33	33.0
	4–6 tahun	42	42.0
	>6 tahun	20	20.0
Omset/bulan	< 2.000.000	22	22.0
	2.000.000–5.000.000	40	40.0
	5.000.001–10.000.000	27	27.0
	>10.000.000	11	11.0

Sumber: Data diolah, 2026

### **Statistik deskriptif variabel penelitian**

Secara umum, kelima variabel berada pada kategori tinggi, yang mengindikasikan bahwa responden menilai pemberdayaan, kemudahan perizinan, inovasi, dukungan pemerintah, serta daya saing UMKM sudah berjalan relatif baik. Pada variabel pemberdayaan ( $X_1$ ), rata-rata variabel mencapai 4,16 (tinggi), dengan pernyataan terkuat berada pada aspek kemandirian usaha pasca program dan pengalaman mengikuti pelatihan. Pada variabel kemudahan perizinan ( $X_2$ ), rata-rata sebesar 4,15 (tinggi), dan item tertinggi ada pada kemudahan pengurusan izin secara online/digital. Variabel inovasi bisnis ( $X_3$ ) memiliki rata-rata 4,16 (tinggi), dengan item tertinggi pada upaya menciptakan produk baru dan inovasi yang meningkatkan hasil usaha. Pada variabel dukungan pemerintah ( $X_4$ ), rata-rata 4,12 (tinggi), dengan

penguatan terlihat pada fasilitas promosi/pameran serta dukungan akses pemasaran. Terakhir, variabel daya saing UMKM (Y) menunjukkan rata-rata 4,17 (tinggi), dan item tertinggi ada pada konsistensi inovasi agar produk tetap diminati pasar.

**Tabel 2.** Statistik deskriptif variabel (ringkas)

Variabel	Rata-rata	Kategori
Pemberdayaan ( $X_1$ )	4,16	Tinggi
Kemudahan Perizinan ( $X_2$ )	4,15	Tinggi
Inovasi Bisnis ( $X_3$ )	4,16	Tinggi
Dukungan Pemerintah ( $X_4$ )	4,12	Tinggi
Daya Saing UMKM (Y)	4,17	Tinggi

Sumber : (Rincian item per variabel berdasarkan rangkaian tabel-tabel instrumen hasil temuan)

**Uji kualitas data (validitas dan reliabilitas)**

Seluruh item pernyataan dinyatakan valid ( $r$ -hitung >  $r$ -tabel), sehingga indikator pada masing-masing variabel layak digunakan untuk analisis lanjutan. Instrumen juga memenuhi reliabilitas internal, ditunjukkan oleh nilai Cronbach's Alpha yang seluruhnya berada pada kategori reliabel, baik untuk variabel independen maupun variabel dependen.

**Tabel 3.** Reliabilitas instrumen (Cronbach's Alpha)

Variabel	Jumlah item	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pemberdayaan ( $X_1$ )	5	0,796	Reliabel
Kemudahan Perizinan ( $X_2$ )	5	0,878	Reliabel
Inovasi Bisnis ( $X_3$ )	5	0,849	Reliabel
Dukungan Pemerintah ( $X_4$ )	5	0,852	Reliabel
Daya Saing UMKM (Y)	5	0,792	Reliabel

Sumber : data diolah, 2026

**Uji asumsi klasik**

Hasil uji normalitas menunjukkan nilai signifikansi 0,200 (>0,05), sehingga data memenuhi asumsi normalitas. Uji multikolinearitas menunjukkan nilai Tolerance > 0,10 dan VIF < 10, sehingga tidak terjadi multikolinearitas pada model. Uji heteroskedastisitas (Glejser) juga mengindikasikan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas karena nilai signifikansi seluruh variabel berada di atas 0,05. Uji autokorelasi menghasilkan nilai Durbin-Watson 2,037, dengan kesimpulan tidak terjadi autokorelasi.

**Tabel 4.** Ringkasan uji asumsi klasik

Uji	Indikator	Hasil	Kesimpulan
Normalitas	Sig. K-S = 0,200	> 0,05	Normal

Multikolinearitas	Tolerance > 0,10; VIF < 10	Terpenuhi	Tidak ada multikolinearitas
Heteroskedastisitas	Sig. Glejser > 0,05	Terpenuhi	Tidak ada heteroskedastisitas
Autokorelasi	DW = 2,037	~2	Tidak ada autokorelasi

Sumber : data diolah, 2026

### **Analisis regresi linier berganda, uji F, uji t, dan koefisien determinasi**

Hasil regresi menunjukkan seluruh variabel independen berpengaruh positif terhadap daya saing UMKM. Persamaan regresi yang terbentuk adalah:  
 $Y = 3,454 + 0,274X_1 + 0,145X_2 + 0,197X_3 + 0,226X_4$ .

**Tabel 5.** Hasil regresi linier berganda (Coefficients)

Variabel	B	t-hitung	Sig.
Konstanta	3,454	11,071	0,000
Pemberdayaan ( $X_1$ )	0,274	2,969	0,004
Kemudahan Perizinan ( $X_2$ )	0,145	2,157	0,034
Inovasi Bisnis ( $X_3$ )	0,197	2,193	0,031
Dukungan Pemerintah ( $X_4$ )	0,226	2,769	0,007

Sumber : data diolah, 2026

Uji simultan (uji F) menghasilkan F-hitung 13,559 dengan signifikansi 0,000, yang menegaskan bahwa pemberdayaan, kemudahan perizinan, inovasi bisnis, dan dukungan pemerintah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap daya saing UMKM. Secara parsial, seluruh variabel independen juga signifikan (Sig. < 0,05), sehingga keempat hipotesis diterima. Temuan ini bermakna bahwa peningkatan kualitas program pemberdayaan, kemudahan perizinan, intensitas inovasi, dan dukungan pemerintah akan diikuti oleh penguatan daya saing UMKM di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

**Tabel 6.** Uji F (ANOVA)

Sumber variasi	Sum of Squares	df	Mean Square	F-hitung	Sig.
Regresi	8,644	4	2,161	13,559	0,000
Residual	15,143	95	0,159	-	-
Total	23,787	99	-	-	-

Sumber : data diolah, 2026

Koefisien determinasi menunjukkan  $R^2 = 0,363$  dan Adjusted  $R^2 = 0,337$ , artinya sekitar 33,7% variasi daya saing UMKM dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen dalam model, sementara sisanya dipengaruhi faktor lain di luar penelitian.

**Tabel 7.** Koefisien determinasi (Model Summary)

R	R <sup>2</sup>	Adjusted R <sup>2</sup>	Std. Error
0,603	0,363	0,337	0,39902

Sumber : data diolah, 2026

**Pembahasan**

Temuan penelitian pada UMKM di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menunjukkan bahwa model regresi yang dibangun menempatkan pemberdayaan, kemudahan perizinan, inovasi bisnis, dan dukungan pemerintah sebagai penjelas utama variasi daya saing UMKM. Secara simultan, keempat variabel tersebut terbukti berpengaruh signifikan, yang tercermin dari uji F dengan nilai  $F = 13,559$  dan  $\text{Sig.} = 0,000$ , sehingga model layak digunakan untuk membaca pola hubungan dalam konteks daerah penelitian. Pada level parsial, masing-masing variabel juga signifikan dengan koefisien positif: pemberdayaan ( $\beta = 0,274$ ;  $\text{Sig.} = 0,004$ ), kemudahan perizinan ( $\beta = 0,145$ ;  $\text{Sig.} = 0,034$ ), inovasi bisnis ( $\beta = 0,197$ ;  $\text{Sig.} = 0,031$ ), dan dukungan pemerintah ( $\beta = 0,226$ ;  $\text{Sig.} = 0,007$ ). Secara substansial, persamaan regresi yang dihasilkan,  $Y = 3,454 + 0,274X_1 + 0,145X_2 + 0,197X_3 + 0,226X_4$ , menegaskan bahwa daya saing adalah keluaran dari kombinasi faktor internal dan ekosistem kebijakan yang mengitarinya. Namun, kekuatan penjelasan model masih moderat ( $R^2$  sekitar 0,36), yang mengindikasikan adanya ruang bagi faktor lain dalam menjelaskan sisa variasi daya saing. Faktor-faktor tersebut antara lain akses pembiayaan, kualitas infrastruktur, literasi digital, jejaring pasok, dan orientasi kewirausahaan (Tambunan, 2020; World Bank, 2020).

Pengaruh positif signifikan pemberdayaan memperlihatkan bahwa daya saing UMKM tidak semata-mata soal modal, melainkan juga tentang kapabilitas pelaku usaha dalam mengelola pengetahuan, keterampilan, jejaring, dan keyakinan diri untuk bertahan di pasar. Secara teoretis, pemberdayaan memindahkan posisi pelaku UMKM dari objek program menjadi subjek yang memiliki kontrol lebih besar atas keputusan usaha, sehingga dampaknya cenderung lebih berkelanjutan (Perkins & Zimmerman, 2020). Dalam perspektif berbasis sumber daya, pelatihan dan pendampingan dapat dipahami sebagai mekanisme pembentukan aset tak berwujud, yaitu kompetensi, rutinitas kerja, dan pengetahuan pasar, yang menjadi fondasi keunggulan bersaing (Barney, 2020). Temuan ini penting karena penelitian juga menegaskan adanya tantangan struktural terkait keterbatasan pemberdayaan UMKM di wilayah studi, sehingga penguatan kapasitas menjadi kebutuhan mendasar dan bukan sekadar pelengkap kebijakan. Namun secara kritis,

pemberdayaan sering gagal bukan karena ide programnya, melainkan karena kualitas desain dan kesinambungan implementasi: pelatihan yang terlalu umum, pendampingan yang episodik, serta minimnya mekanisme evaluasi hasil pascaprogram dapat membuat pengaruh pemberdayaan menjadi dangkal. Dengan demikian, makna koefisien positif dalam penelitian ini seharusnya tidak dibaca sebagai asumsi sederhana bahwa peningkatan jumlah pelatihan otomatis meningkatkan daya saing, melainkan sebagai tuntutan untuk memperbaiki arsitektur pemberdayaan agar benar-benar mengubah praktik bisnis UMKM. Arah kebijakannya perlu memastikan pemberdayaan terhubung langsung dengan kebutuhan pasar, standar kualitas produk, dan strategi pemasaran, bukan berhenti pada output administratif berupa sertifikat pelatihan (Widyastuti et al., 2022).

Pengaruh signifikan kemudahan perizinan menegaskan bahwa legalitas bukan sekadar urusan administrasi, melainkan pintu masuk UMKM pada akses pasar, pembiayaan, dan program bantuan. Dari sudut pandang kelembagaan, kualitas institusi—aturan dan layanan publik—membentuk biaya transaksi dan kepastian usaha; ketika prosedur mudah dan cepat, pelaku UMKM dapat mengalokasikan energi pada aktivitas produktif (North, 2022). Dalam konteks Indonesia, hambatan perizinan sering disebut sebagai salah satu sumber “ketertinggalan skala” UMKM karena mengunci akses ke kredit formal, pengadaan pemerintah, atau kemitraan rantai pasok (Tambunan, 2020). Temuan ini konsisten dengan argumen bahwa perbaikan kemudahan berusaha akan mendorong formalisasi dan memperkuat iklim usaha, terutama bagi pelaku kecil yang rentan pada biaya kepatuhan (World Bank, 2020). Meski demikian, pembacaan kritis perlu memasukkan fakta bahwa responden penelitian ditarik dari pelaku UMKM yang terkait kewajiban pajak daerah, sehingga mereka cenderung lebih dekat pada proses formal dibanding kelompok UMKM yang sepenuhnya informal. Artinya, pengaruh kemudahan perizinan bisa lebih kuat lagi jika penelitian juga menangkap kelompok UMKM informal yang paling “terhambat” oleh birokrasi. Karena itu, implikasi kebijakan paling penting bukan hanya digitalisasi layanan, tetapi juga penyederhanaan proses end-to-end, pengurangan biaya tersembunyi, serta pendampingan literasi perizinan agar perbaikan institusional benar-benar inklusif (Hutabarat, 2022; Lestari, 2023).

Variabel inovasi bisnis yang signifikan memperlihatkan bahwa daya saing UMKM sangat ditentukan oleh kemampuan melakukan pembaruan—baik inovasi produk, proses, maupun pemasaran—yang relevan dengan perubahan selera

konsumen dan intensitas persaingan. Secara konseptual, inovasi UMKM tidak harus berbentuk teknologi tinggi; pembaruan kemasan, diferensiasi layanan, penyesuaian harga, dan strategi pemasaran digital merupakan bentuk inovasi yang nyata dalam pasar lokal (OECD, 2018; Pratama & Dewi, 2021). Temuan penelitian ini sejalan dengan literatur yang menempatkan inovasi sebagai mesin adaptasi yang membantu UMKM bertahan di tengah ketidakpastian dan tekanan kompetisi (Rahman, 2022; Lee & Huang, 2022). Dalam kerangka kapabilitas dinamis, inovasi terjadi ketika pelaku UMKM mampu merasakan peluang, menangkapnya melalui keputusan strategis, lalu merekonfigurasi sumber daya yang dimiliki untuk merespons pasar (Teece, 2020). Namun secara kritis, inovasi UMKM sering terhambat oleh keterbatasan modal kerja, akses bahan baku, dan kemampuan membaca data pasar, sehingga inovasi berisiko menjadi “reaktif” dan jangka pendek. Pada titik ini, koefisien positif inovasi bisnis harus dipahami sebagai sinyal bahwa inovasi sudah mulai bekerja, tetapi masih membutuhkan dukungan sistemik agar tidak berhenti pada inovasi kosmetik (misalnya sekadar perubahan kemasan) tanpa peningkatan kualitas dan produktivitas. Oleh karena itu, strategi penguatan inovasi yang lebih tajam perlu menekankan pembelajaran berbasis pasar (market learning), kolaborasi pengetahuan, dan akses jaringan (Chesbrough, 2021; Nugroho, 2023).

Hasil signifikan pada dukungan pemerintah menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah bukan hanya regulator, tetapi juga enabler yang membentuk ekosistem: membuka akses promosi, memfasilitasi pelatihan dan pendampingan, memperluas jaringan pasar, serta menjembatani UMKM dengan pembiayaan dan kemitraan. Dalam pendekatan kebijakan UMKM, dukungan pemerintah dapat menciptakan nilai publik ketika dirancang sebagai layanan yang menutup “kesenjangan kapabilitas” UMKM dibanding pelaku usaha besar (Moore, 2021; Storey, 2020). Temuan ini juga relevan dengan konteks daerah penelitian yang disebut memiliki tantangan berupa minimnya dukungan pemerintah daerah, sehingga penguatan dukungan menjadi bagian dari koreksi struktural pembangunan ekonomi lokal. Secara empiris, bukti riset lain juga menunjukkan bahwa bantuan pemerintah dapat memperkuat resiliensi UMKM pada situasi ketidakpastian, terutama ketika bantuan terhubung dengan kebutuhan operasional dan akses pasar (Handayani, 2022; Fitriani, 2023). Meski demikian, analisis kritis perlu menggarisbawahi dua risiko: pertama, dukungan yang terlalu berbasis bantuan dapat menciptakan ketergantungan; kedua, dukungan yang tidak tepat

sasaran dapat memperlebar kesenjangan antarpelaku UMKM (yang “dekat” dengan program vs yang “jauh”). Karena itu, dukungan pemerintah perlu bergeser dari pendekatan proyek sesaat menuju pembangunan ekosistem: standardisasi mutu, kurasi pasar, fasilitasi agregasi produksi, serta penguatan kelembagaan UMKM agar dampaknya kumulatif dan terukur (Johnson, 2020; Ningsih, 2023).

Jika dibaca secara integratif, penelitian ini menegaskan bahwa daya saing UMKM bersifat multidimensional: pemberdayaan memperkuat faktor internal, kemudahan perizinan memperbaiki iklim kelembagaan, inovasi bisnis mendorong adaptasi pasar, dan dukungan pemerintah menutup celah ekosistem. Kombinasi ini menjelaskan mengapa kebijakan parsial sering tidak efektif: pelatihan tanpa legalitas akan membatasi akses pasar dan program, legalitas tanpa inovasi membuat UMKM “formal tetapi stagnan”, dan inovasi tanpa dukungan ekosistem sering berhenti karena keterbatasan sumber daya. Karena itu, implikasi strategis dari persamaan regresi penelitian adalah perlunya orkestrasi intervensi, bukan program yang berdiri sendiri. Di sisi lain, nilai  $R^2$  yang moderat memberi pesan bahwa empat variabel ini penting tetapi belum cukup, sehingga agenda kebijakan dan riset lanjutan perlu menambahkan determinan lain yang relevan untuk konteks Bolaang Mongondow Selatan—misalnya pembiayaan, infrastruktur logistik, dan literasi digital (Tambunan, 2020; Nugroho, 2023). Secara kritis, integrasi program juga perlu memperhitungkan urutan (sequencing): perbaikan perizinan dan pendampingan legalitas dapat menjadi prasyarat agar program inovasi dan pemasaran lebih mudah masuk ke skema pembiayaan dan akses pasar. Dalam praktiknya, penguatan daya saing akan lebih efektif jika pemda membangun “jalur layanan UMKM” yang menghubungkan legalitas–pelatihan–inkubasi inovasi–kurasi produk–akses pasar dalam satu arsitektur layanan. Kerangka kolaboratif lintas aktor (pemerintah–komunitas–swasta) juga relevan untuk memastikan program tidak menjadi top-down dan lebih adaptif pada kebutuhan pelaku (Ansell & Gash, 2021; Ningsih, 2023).

Kekuatan pembacaan hasil penelitian juga didukung oleh kualitas instrumen dan kelayakan model statistik. Hasil menunjukkan reliabilitas yang memadai (misalnya Cronbach’s alpha pada konstruk berada sekitar  $\geq 0,79$ ), sehingga pengukuran relatif konsisten dan layak untuk analisis lanjutan. Pengujian asumsi klasik juga mengindikasikan model tidak bermasalah secara serius, seperti normalitas residual (Asymp. Sig. 0,200), multikolinearitas yang rendah (VIF sekitar 1,0–1,18), serta tidak ada indikasi autokorelasi yang mengganggu (Durbin–Watson  $\approx$

2,037). Namun secara kritis, ada keterbatasan desain yang perlu disebut agar interpretasi tidak berlebihan, terutama karena sampel ditentukan melalui accidental sampling dengan jumlah 100 responden, yang dipilih berdasarkan kemudahan akses pada pelaku UMKM dengan kriteria tertentu. Strategi ini efektif secara praktis untuk populasi yang tersebar dan heterogen, tetapi berpotensi membatasi generalisasi hasil ke seluruh UMKM, khususnya kelompok yang lebih informal atau kurang terhubung dengan layanan pemerintah. Selain itu, penggunaan kuesioner tunggal membuka kemungkinan bias persepsi dan common method bias, sehingga riset lanjutan sebaiknya mengombinasikan data persepsi dengan indikator objektif (misalnya pertumbuhan penjualan, perluasan pasar, atau intensitas inovasi yang terukur). Dengan menyatakan batasan ini, temuan penelitian justru menjadi lebih kuat karena transparan dan membuka ruang replikasi pada wilayah lain atau dengan desain sampling yang lebih probabilistik.

Dari sisi penelitian terdahulu, hasil ini menguatkan arus besar literatur yang menempatkan pemberdayaan, kualitas institusi/perizinan, inovasi, dan dukungan pemerintah sebagai determinan penting daya saing UMKM. Studi-studi pengembangan UMKM di Indonesia menegaskan bahwa daya saing bertumpu pada peningkatan kapasitas internal pelaku, yang sering terhambat oleh keterbatasan keterampilan dan akses sumber daya (Tambunan, 2020; Widyastuti et al., 2022). Literatur kelembagaan juga menekankan bahwa kualitas regulasi dan kemudahan perizinan memengaruhi formalisasi dan akses UMKM terhadap pasar serta pembiayaan (North, 2022; Wahyudi, 2021). Di sisi inovasi, bukti empiris menempatkan inovasi sebagai penggerak ketahanan dan kinerja UMKM, terutama di negara berkembang yang menghadapi kompetisi produk substitusi dan perubahan preferensi konsumen (Rahman, 2022; OECD, 2018). Penelitian tentang dukungan pemerintah menunjukkan bahwa bantuan dan fasilitasi dapat memperkuat resiliensi UMKM, khususnya pada fase krisis, meski efektivitasnya sangat bergantung pada ketepatan desain program (Handayani, 2022; Fitriani, 2023). Dengan demikian, posisi temuan penelitian ini bukan “berdiri sendiri”, tetapi memperkaya bukti bahwa daya saing UMKM lahir dari interaksi kapabilitas internal dan ekosistem kebijakan. Namun yang membedakan konteks daerah adalah bagaimana kendala struktural lokal—yang dalam hasil disebut mencakup pemberdayaan terbatas, perizinan lambat, inovasi rendah, dan dukungan pemerintah minim—membuat penguatan daya saing menjadi agenda pembangunan yang lebih mendesak.

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan literatur daya saing UMKM di konteks daerah, terutama melalui pengujian empat variabel determinan secara terintegrasi dalam satu kerangka empiris. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pemberdayaan, kemudahan perizinan, inovasi bisnis, dan dukungan pemerintah seluruhnya berpengaruh positif dan signifikan, baik secara parsial maupun simultan, terhadap daya saing UMKM. Temuan ini menguatkan argumentasi bahwa intervensi kebijakan UMKM perlu dirancang secara terpadu dan tidak bersifat sektoral, mengingat pelaku UMKM di lapangan menghadapi keempat faktor tersebut secara bersamaan. Kontribusi penelitian juga terletak pada penegasan bahwa penguatan daya saing UMKM di wilayah dengan struktur ekonomi pertanian, perikanan, dan perdagangan seperti Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memerlukan kombinasi strategi yang berbeda dibandingkan wilayah dengan basis industri besar. Lebih lanjut, hasil penelitian ini juga membuka peluang pengembangan model yang lebih komprehensif pada studi berikutnya, misalnya dengan memasukkan faktor pembiayaan dan literasi digital sebagai variabel penjelas tambahan (Kurniawati et al., 2022; Nugroho, 2023). Pendekatan campuran (*mixed methods*) juga dapat dipertimbangkan untuk menelusuri mekanisme kausal secara lebih mendalam, terutama untuk menjawab pertanyaan mengapa kemudahan perizinan belum sepenuhnya mengubah akses pasar UMKM apabila inovasi dan jejaring usaha belum terbentuk secara memadai.

Secara praktis, implikasi hasil penelitian dapat diarahkan pada tiga agenda besar. Pertama, pemerintah daerah perlu merancang pemberdayaan berbasis kebutuhan pasar, meliputi pelatihan yang spesifik per sektor, pendampingan yang berkelanjutan, dan evaluasi pascaprogram yang menilai perubahan praktik bisnis, bukan sekadar jumlah peserta (Perkins & Zimmerman, 2020; Widyastuti et al., 2022). Kedua, reformasi perizinan harus difokuskan pada penyederhanaan layanan secara menyeluruh dan pendampingan literasi layanan, agar manfaat kemudahan perizinan tidak hanya dirasakan UMKM yang sudah relatif dekat dengan birokrasi (North, 2022; Hutabarat, 2022). Ketiga, penguatan inovasi perlu digabungkan dengan dukungan ekosistem berupa akses pasar melalui kurasi dan pameran, kolaborasi pengetahuan, serta fasilitasi transformasi digital, sehingga inovasi tidak berhenti pada perubahan kecil yang tidak menaikkan produktivitas (OECD, 2018; Teece, 2020). Pada tingkat pelaku UMKM, hasil penelitian ini menuntut orientasi manajerial yang lebih adaptif, yaitu memperbaiki legalitas untuk membuka akses,

---

berinvestasi pada pembelajaran pasar, dan membangun jejaring sebagai modal sosial bisnis (Barney, 2020; Chesbrough, 2021). Pada tingkat kebijakan, hasil simultan menyiratkan bahwa keberhasilan program akan lebih tinggi apabila pemerintah daerah membangun tata kelola kolaboratif lintas aktor dengan indikator kinerja yang jelas, sehingga dukungan pemerintah dapat berfungsi sebagai mesin ekosistem UMKM yang berkelanjutan, bukan sekadar program tahunan (Ansell & Gash, 2021; Storey, 2020). Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat argumen bahwa peningkatan daya saing UMKM di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menuntut keterpaduan kebijakan yang menempatkan kapabilitas internal pelaku usaha dan kualitas ekosistem eksternal sebagai dua sisi yang saling memperkuat.

## **5. SIMPULAN dan SARAN**

### **Simpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan, kemudahan perizinan, inovasi bisnis, dan dukungan pemerintah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya saing UMKM di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ( $F = 13,559$ ;  $\text{Sig.} = 0,000$ ), dengan kemampuan model menjelaskan sekitar 33,7% variasi daya saing ( $\text{Adjusted } R^2 = 0,337$ ). Secara parsial, keempat variabel juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan, dengan pemberdayaan sebagai variabel berkontribusi terbesar ( $\beta = 0,274$ ;  $\text{Sig.} = 0,004$ ), diikuti dukungan pemerintah ( $\beta = 0,226$ ;  $\text{Sig.} = 0,007$ ), inovasi bisnis ( $\beta = 0,197$ ;  $\text{Sig.} = 0,031$ ), dan kemudahan perizinan ( $\beta = 0,145$ ;  $\text{Sig.} = 0,034$ ). Dengan demikian, seluruh hipotesis penelitian ( $H_1$  hingga  $H_5$ ) diterima.

Temuan tersebut menegaskan bahwa daya saing UMKM merupakan keluaran yang bersifat multidimensional dan tidak dapat ditopang oleh intervensi tunggal, melainkan menuntut keterpaduan antara penguatan kapabilitas internal pelaku usaha dengan kualitas ekosistem kebijakan di sekitarnya. Nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* yang moderat juga mengindikasikan bahwa terdapat faktor-faktor lain di luar model, seperti akses pembiayaan, kualitas infrastruktur, literasi digital, dan orientasi kewirausahaan, yang berpotensi turut menjelaskan variasi daya saing UMKM. Oleh karena itu, hasil penelitian perlu dibaca secara proporsional sesuai karakter sampel dan konteks wilayah kajian.

### **Saran**

*Saran bagi Pemerintah Daerah.* Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disarankan merancang kebijakan UMKM secara terpadu dengan menempatkan keempat variabel sebagai satu kesatuan ekosistem. Mengingat pemberdayaan memberikan kontribusi terbesar, prioritas kebijakan sebaiknya diarahkan pada penguatan kapasitas pelaku usaha berbasis klaster, sementara dukungan pemerintah, kemudahan perizinan, dan pembinaan inovasi diposisikan sebagai elemen ekosistem yang saling melengkapi.

*Saran bagi Pelaku UMKM.* Pelaku UMKM disarankan memperkuat orientasi manajerial yang adaptif dengan memanfaatkan legalitas usaha sebagai pintu masuk akses pembiayaan dan pasar formal, mendorong inovasi yang substansial, serta membangun jejaring usaha melalui komunitas, koperasi, atau asosiasi guna memperkuat posisi tawar kolektif.

*Saran bagi Penelitian Lanjutan.* Peneliti selanjutnya disarankan menambahkan variabel determinan lain seperti akses pembiayaan, literasi digital, dan orientasi kewirausahaan agar daya jelas model meningkat, menggunakan teknik *probability sampling* untuk meningkatkan generalisasi hasil, serta menerapkan pendekatan campuran (*mixed methods*) yang memadukan data persepsi dengan indikator objektif. Pengujian ulang model pada kabupaten lain juga disarankan untuk menilai konsistensi temuan di wilayah dengan karakteristik berbeda.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ansell, C & Gash, A 2021, 'Collaborative governance in practice: SME support in local economies', *Journal of Public Administration Research*, vol. 31, no. 2, hlm. 215–232.
- Barney, J 2020, 'Resource-based view of the firm: Ten years after', *Journal of Business Venturing*, vol. 35, no. 6, hlm. 106002, dilihat 10 Mei 2026, <https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2020.106002>.
- Chesbrough, H 2021, 'Open innovation in SMEs: Collaboration and knowledge sharing', *R&D Management*, vol. 51, no. 3, hlm. 245–262.
- Ferdinand, A 2022, *Metode penelitian manajemen: Pedoman penelitian untuk penulisan skripsi, tesis, dan disertasi ilmu manajemen*, edisi ke-5, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Fitriani, E 2023, 'Government support and SME development: Evidence from Indonesia', *International Journal of Entrepreneurship and Small Business*, vol. 48, no. 2, hlm. 145–163, dilihat 10 Mei 2026, <https://doi.org/10.1080/08276331.2021.1922925>.
- Handayani, S 2022, 'Government assistance during COVID-19 and SME resilience', *Indonesian Journal of Business Research*, vol. 14, no. 1, hlm. 33–48.
- Hutabarat, D 2022, 'Barriers to SME licensing in rural Indonesia', *Journal of Southeast Asian Studies*, vol. 53, no. 4, hlm. 612–630.

- Johnson, C 2020, 'The developmental state and small business support', *Development Policy Review*, vol. 38, no. 5, hlm. 567–584.
- Kurniawati, D, Saputra, R & Hidayat, A 2022, 'Financial access and empowerment of SMEs in Indonesia', *Journal of Small Business Strategy*, vol. 32, no. 2, hlm. 88–104.
- Lestari, N 2023, 'Digital licensing and SME formalization in Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, vol. 8, no. 1, hlm. 21–39.
- Moore, G 2021, 'Community empowerment and local economic development', *Journal of Community Development*, vol. 52, no. 3, hlm. 301–319.
- Ningsih, T 2023, 'Entrepreneurial empowerment and competitiveness among micro-enterprises', *Indonesian Journal of Entrepreneurship*, vol. 9, no. 2, hlm. 112–128.
- North, D 2022, 'Institutions and economic performance: Revisiting transaction cost theory', *Journal of Institutional Economics*, vol. 18, no. 3, hlm. 415–433.
- Nugroho, A 2023, 'Business innovation and SME performance: Evidence from Indonesian regions', *Asia Pacific Journal of Innovation*, vol. 11, no. 1, hlm. 55–72.
- Nunnally, JC & Bernstein, IH 2020, *Psychometric theory*, 3rd edn, McGraw-Hill, New York.
- OECD/Eurostat 2018, *Oslo manual 2018: Guidelines for collecting, reporting and using data on innovation*, 4th edn, OECD Publishing, Paris, dilihat 10 Mei 2026, <https://doi.org/10.1787/9789264304604-en>.
- Perkins, P & Zimmerman, MA 2020, 'The role of empowerment in SME performance', *Journal of Small Business Management*, vol. 58, no. 4, hlm. 720–738.
- Porter, ME 1990, *The competitive advantage of nations*, Free Press, New York.
- Porter, ME 2021, 'Competitive advantage revisited', *Long Range Planning*, vol. 54, no. 6, hlm. 102125, dilihat 10 Mei 2026, <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2021.102125>.
- Rahman, S 2022, 'Business innovation and competitiveness: A systematic review', *Journal of Innovation Studies*, vol. 9, no. 3, hlm. 178–196.
- Republik Indonesia 2008, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Republik Indonesia 2023, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Storey, D 2020, 'Public policy and SME development', *Small Business Economics*, vol. 54, no. 2, hlm. 411–430.
- Tambunan, T 2019, 'Recent evidence of the development of micro, small and medium enterprises in Indonesia', *Journal of Global Entrepreneurship Research*, vol. 9, no. 18, hlm. 1–15, dilihat 10 Mei 2026, <https://doi.org/10.1186/s40497-018-0140-4>.
- Tambunan, T 2020, 'SME development and competitiveness in Indonesia', *Indonesian Economic Journal*, vol. 28, no. 3, hlm. 245–263.
- Teece, DJ 2020, 'Dynamic capabilities and SME competitiveness', *Strategic Management Journal*, vol. 41, no. 8, hlm. 1395–1412.
- Wahyudi, F 2021, 'Simplification of licensing and SME competitiveness', *Journal of Public Administration*, vol. 23, no. 1, hlm. 67–84.
- Widyastuti, R, Pratiwi, D & Suryani, L 2022, 'Empowerment and competitiveness of SMEs: Evidence from Indonesia', *Journal of Entrepreneurship and Development*, vol. 12, no. 2, hlm. 95–113.

World Bank 2019, *Doing business 2019: Training for reform*, World Bank, Washington, DC, dilihat 10 Mei 2026, <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1326-9>.

World Bank 2020, *Doing business 2020: Comparing business regulation in 190 economies*, World Bank, Washington, DC, dilihat 10 Mei 2026, <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1440-2>.

Zimmerman, M 2020, 'Psychological empowerment and SME growth: Theory and practice', *Journal of Applied Psychology*, vol. 105, no. 4, hlm. 432–450